

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG DI PASAR MARABAHAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG SANKSI SOSIAL BAGI BADAN USAHA YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN”

Alisa Hayatun Nu'fus¹, Istiana Heriani², Maria Ulfah³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810313

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1125017902

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1116088201

Email: 02alisahayatun@gmail.com

ABSTRAK

"Fenomena pasar kota Marabahan telah menjadi salah satu fokus penyebaran Covid-19 karena adanya pedagang dari berbagai daerah seperti Banjarmasin, Barabai, dan tempat lain yang berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan di pasar Marabahan. Sebagian pedagang patuh terhadap protokol kesehatan, sejalan dengan peraturan Bupati Batola Nomor 54 tahun 2020 yang mengenakan sanksi sosial kepada badan usaha yang melanggar protokol kesehatan. Namun, ada juga yang tidak patuh karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan Bupati tersebut, terutama bagi pedagang pendatang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan penyebaran virus corona

Ketidapatuhan dan ketaatan masyarakat, terutama para pedagang, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Bupati Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis literatur dan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di kota Marabahan selama pandemi ini dilakukan melalui Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun upaya sosialisasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 telah dilakukan, penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan masih belum optimal. Ini disebabkan oleh terus adanya pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat di kota Marabahan selama pandemi Covid-19. Peraturan Bupati Batola memberikan berbagai sanksi kepada pelanggar, seperti teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial, dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Penegakkan hukum, Pedagang di Marabahan, Peraturan Bupati 54 Tahun 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Satu Suara Pembaharuan, Tajuk Rencana, *Penegakan Protokol Kesehatan*, <https://beritasatumediald.bz/SP-200718/6/>, (Diakses tanggal 9 November 2020).
- Berita Satu Suara Pembaharuan, Tajuk Rencana, *Penegakan Protokol Kesehatan*, <https://beritasatumediald.bz/SP-200718/6/>.
- Chainur Anasjid, (2000), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 23
<https://satpolpp.batam.go.id/tugas-fungsi/>
- Jordi S, Jonnybronn, (2018), "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", Cet 2, Depok : Prenadamedia Group, Hlm 149.
- Komelius Benuf, Muhammd Azhar, (2020), "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi : I Juni 2020, hlm. 30.
- Lihat Pada Pasal 67, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 8
- Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, hlm.26.
- Saragih, N. I., Hartati, V., & Fauzi, M. (2020). Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 9(2), 77- 86. DOI: <https://doi.org/10.26593/jrsi.v9i2.4009.77-86>
- Siregar, S. N. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>, (Diakses tanggal 9 November 2020).
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 10.
- Syamsul hakim, E. (2020). Peran Bank Dunia Dalam Mendukung Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia. Presentasi disampaikan pada Webinar "Membangun Kerja Sama Pembangunan Internasional Dalam Penanganan COVID-19" Hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2022
- Utami, S. D. (2020). Materi Webinar. Efek Pandemi Covid 19 terhadap Gangguan Mental Terhadap Masyarakat dan Penderita Covid 19. Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020.
- Very, Protokol Kesehatan Dibuat untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat dari Wabah Covid-19, *Indonews.id*, <https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19/>, (Diakses tanggal 9 November 2020).
- Very, Protokol Kesehatan Dibuat untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat dari Wabah Covid-19, *Indonews.id*, <https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19>
- Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2020). Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 150-161. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6737>.
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah taktis pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 247-260. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>

Wawancara Dengan Ibu Lisa Hadiyati, S.H. yang menjabat sebagai Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, Senin, 06 Juni 2022.